

Laporan Kinerja
KPKNL GORONTALO

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEU
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO

 Jalan Achmad Ndjamuddin No. 7 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

 (0435) 823727

 kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id

 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlgorontalo>

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v

I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis KPKNL	5
D. Permasalahan Utama	7
E. Sistematika Laporan	7

II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	9
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja	10
C. Pengukuran Kinerja	14
D. Penjelasan Adendum Kinerja	14

III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	15
Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	17
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	20
Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	22
Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	23
Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	27
Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	28
Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif	30
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	31
Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten	32
Sasaran Strategis 10: Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	34
Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	36
B. Realisasi Anggaran	41
C. Capaian Kinerja Lainnya	41

IV

Penutup

Penutup 43

LAMPIRAN 44

Nilai Kinerja Organisasi 2022

Kontrak Kinerja Tahun 2022

Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo Tahun 2022 disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementeraian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Gorontalo selama tahun 2022

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Performa KPKNL Gorontalo dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirangkum dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. NKO KPKNL Gorontalo Tahun 2022 adalah sebesar 114,92% dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang ditetapkan antara Kepala KPKNL Gorontalo dengan Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari hasil koordinasi, dukungan, dan kerja sama yang baik antara KPKNL Gorontalo dengan seluruh *stakeholders*.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Gorontalo, serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan di tahun 2022

Gorontalo, 07 Januari 2023
Kepala KPKNL Gorontalo



Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Gorontalo Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan (sasaran strategis).

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN, KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. KPKNL Gorontalo telah menetapkan visi yang sejalan dengan visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, KPKNL Gorontalo telah menetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan, yang juga merupakan misi dari DJKN, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

KPKNL Gorontalo telah menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, serta birokrasi layanan publik DJKN yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mengukur kinerja, KPKNL Gorontalo menerapkan sistem *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif dalam perencanaan strategis, alat untuk

menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, terukur dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peta sasaran strategis

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2022 dengan menerapkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholder, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta Strategi Tahun 2022 tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi;
4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
7. Edukasi yang efektif;
8. Pengendalian dan pengawasan yang efektif;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi masih terdapat 1 (satu) IKU yang tidak dapat mencapai target dan berstatus kuning yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Sedangkan 19 (sembilan belas) IKU yang lain berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/diatas 100%, sehingga NKO (Nilai Kinerja Organisasi) Tahun 2022 pada KPKNL Gorontalo mencapai 114,92% (status capaian hijau).

BAB I | Pendahuluan



- 
- A. Latar Belakang
 - B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - C. Peran Strategis KPKNL
 - D. Permasalahan Utama
 - E. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 7, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. KPKNL Gorontalo merupakan salah satu dari 85 (delapan puluh lima) kantor vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Gorontalo terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL Gorontalo.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan Daftar Barang Milik Negara.
3. **Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

4. **Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Terdapat dua jabatan fungsional di KPKNL Gorontalo, yaitu Pelelang dan Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KPKNL GORONTALO



Wilayah kerja KPKNL Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

1. Kota Gorontalo;
2. Kabupaten Gorontalo;
3. Kabupaten Bone Bolango;
4. Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Kabupaten Boalemo; dan
6. Kabupaten Pohuwato

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Gorontalo didukung oleh 25 orang pegawai, terdiri dari 6 pejabat struktural, 3 pejabat fungsional pelelang, 1 pejabat fungsional penilai, dan 15 pelaksana dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, hukum, teknologi informasi dan lain sebagainya. Komposisi pegawai KPKNL Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	-	2	1		3
DI	-		2		2
DIII	-	4			4
SI/DIV	-	1	11		12
S2	-		3	1	4
Jumlah	-	7	17	1	25

Sumber : Data Simpeg per 26 Desember 2022

TABEL 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR dan GOLONGAN

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	4	4		8
31-40	-	1	9		10
41-50	-		2		2
Di atas 50	-	2	2	1	5
Total	-	7	17	1	25

Sumber : Data Simpeg per 26 Desember 2022

TABEL 1.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN dan GOLONGAN

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	6	16	1	23
Perempuan	-	1	1		2
Total	-	11	20	1	32

TABEL 1.4
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Pelelang	3
2	Penilai	1
	Total	4

C. Peran Strategis KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo di bidang pengelolaan BMN dilakukan dengan cara melakukan optimalisasi penerimaan (revenue center), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN dengan cara optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum. Serta berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Gorontalo senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sehingga tercipta pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, serta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari Barang Milik Negara.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan

ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD. Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

3. Melakukan Penilaian Aset

Penilaian merupakan salah satu *supporting system* dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dengan demikian hasil penilaian diharapkan dapat turut membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*. Tidak hanya terbatas untuk pengelolaan BMN, Penilai Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel pada Pemerintah Daerah dan terciptanya *good governance* dalam pengelolaan BMD.

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo terus melakukan upaya penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

5. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengurusan piutang Negara dan lelang, KPKNL Gorontalo telah berkontribusi terhadap penerimaan Negara khususnya penerimaan bukan pajak berupa biad pengurusan piutang Negara, Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo memperoleh hasil bea lelang (bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual) dan PNBP lelang lainnya

termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, secara tidak langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Gorontalo juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/ penjualan Barang Milik Negara.

D. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

1. Masih rendahnya kesadaran dari Satker untuk melaporkan pemanfaatan BMN sehingga tidak maksimalnya penerimaan negara utamanya di bidang pemanfaatan BMN, kesadaran penyerahan aset idle kepada pengelola barang juga dalam hal rekonsiliasi barang;
2. Masih terdapat permasalahan BMN seperti BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN dikuasai pihak lain, BMN belum ditemukan sehingga menghambat penetapan utilisasi kekayaan negara;
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap barang lelang khususnya tanah/bangunan terkait lelang eksekusi, hal ini disebabkan karena prosedur pengosongan yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang;
4. Terdapat keberatan/perlawanan/gugatan terhadap pelaksanaan lelang antara lain jenis lelang hak tanggungan sebagai penyelesaian dari kredit macet;
5. Terkait Pengurusan Piutang Negara, penyerahan piutang negara ada yang tidak disertai barang jaminan dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk jaminan hutang;

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2022 kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja Tahun 2022.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Gorontalo tahun 2022.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan selama tahun 2022, KPKNL Gorontalo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Gorontalo optimis mencapai target-target di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Penjelasan Adendum Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki. Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana strategis DJKN mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai unit vertikal visi KPKNL adalah sesuai dengan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara bahwa KPKNL sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, KPKNL Gorontalo memiliki 5 (lima) misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dalam periode 2020-2024, KPKNL Gorontalo mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan di atas, KPKNL Gorontalo menetapkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, yaitu: pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, pengamanan kekayaan negara yang akuntabel serta monitoring dan evaluasi yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pengurusan piutang negara, yaitu pengurusan piutang negara yang optimal dan peningkatan PNBPN dari pengurusan piutang negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang, yaitu pelayanan lelang yang optimal, peningkatan PNBPN dari pelayanan lelang dan pemanfaatan TIK yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan, yaitu SDM yang kompetitif, kepuasan pengguna layanan yang tinggi, pelayanan yang berkualitas, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi serta monitoring dan evaluasi yang efektif.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian disusun Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo. Pada tahun 2022, Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo yang telah ditetapkan sebanyak 11 Sasaran Strategis, antara lain : (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, (2) Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi, (4) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal, (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (6) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif, (7) Edukasi yang efektif, (8) Pengendalian dan pengawasan yang efektif, (9) SDM yang kompeten, (10) Organisasi yang *fit-for-purpose*, dan (11) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal. Sasaran strategis KPKNL Gorontalo yang telah ditetapkan dan dikelompokkan tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2022 sesuai Bagan 2.1. di bawah :

BAGAN 2.1
PETA STRATEGI KPKNL GORONTALO TAHUN 2022



Pada Peta Strategi KPKNL Gorontalo tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari 11 Sasaran Strategis, selanjutnya telah ditetapkan 20 IKU (Indikator Kinerja Utama) pada Tahun 2022. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	%	36

SASARAN STRATEGIS 2

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

SASARAN STRATEGIS 3

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	indeks	4,70

SASARAN STRATEGIS 4

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65
4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	%	100
4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100
4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100

SASARAN STRATEGIS 5
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	19

SASARAN STRATEGIS 6
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	92
6b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	%	10

SASARAN STRATEGIS 7
Edukasi yang Efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	indeks	93

SASARAN STRATEGIS 8
Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	%	85

SASARAN STRATEGIS 9
SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100

SASARAN STRATEGIS 10
Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	indeks	85
10b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja	indeks	80
10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	indeks	90

SASARAN STRATEGIS 11 Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5
11a-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, KPKNL Gorontalo berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize*, *minimize*, maupun *stabilize*;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

D. PENJELASAN ADENDUM KONTRAK KINERJA

Melalui nota dinas Nomor ND-96/KNL.160203/2022 tanggal 26 Juli 2022 hal Permohonan Perubahan/Addendum Manual IKU pada Kontrak Kinerja Seksi Piutang Negara, disampaikan bahwa Kepala KPKNL Gorontalo mengajukan adendum raw data target IKU persentase penurunan *outstanding* piutang negara, yang semula sebesar Rp52.000.000 menjadi Rp57.000.000. Selanjutnya adendum dimaksud ditetapkan Kepala Kanwil DJKN Suluttenggumalut dengan Nota Dinas Nomor ND-1189/WKN.16/2022 tanggal 23 September 2022 hal Penyampaian Addendum Raw Data Target IKU Pengurusan Piutang Negara Tahun 2022 di Lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggumalut.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara
dan Lelang terhadap Perekonomian

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
yang Optimal

Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel
dan Profesional

Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara
dan Lelang yang Efektif

Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten

Sasaran Strategis 10: Organisasi yang *Fit For Purpose*

Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan
BMN yang Optimal

B. Realisasi Anggaran

C. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perpektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar **114,92%**.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2022 KPKNL Gorontalo telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (25%)					30,00%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					120,00%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100	153,39%	153,39%	120,00%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	36%	53,23%	153,43%	120,00%
	Customer Perspective (15%)					16,84%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					120,00%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	167,84%	167,84%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	138,07%	138,07%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					104,47%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,70	4,91	104,47%	104,47%
	Internal Process Perspective (30%)					33,79%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					109,24%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	94%	144,24%	120,00%

Kode	IKU	V/C	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	P/L	100%	101,90%	101,90%	101,90%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	100,00%	100,00%	100,00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	121,00%	121,00%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	19%	0,03%	199,84%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					114,35%
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	P/M	92%	100,00%	108,70%	108,70%
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	200,00%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif					103,42%
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	93,00	96,18	103,42%	103,42%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					116,16%
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	85%	98,73%	116,16%	116,16%
	Learning & Growth Perspective (30%)					34,29%
9	SDM yang Kompeten					120,00%
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose					113,18%
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	95,59	112,46%	112,46%
10b-N	Nilai Review Pengelolaan Kinerja	P/M	80	93,05	116,31%	116,31%
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90,00	99,50	110,76%	110,76%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal					109,75%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	95,5%	95,02%	99,50%	99,50%
11a-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	171%	170,50%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						114,92%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP)

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara berasal dari :

1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN)

PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a. bea lelang,
- b. bea lelang pegadaian,
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d. biaya permohonan lelang,
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2022, penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan

lelang yang diakui yaitu apabila nilai penerimaan atas PNBPN BMN, PN, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai Mata Anggaran Penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang masuk dalam Aplikasi OM SPAN. Target Penerimaan Negara pada KPKNL Gorontalo tahun 2022 sebesar Rp10.704.000.000,- yang terdiri dari PNBPN BMN sebesar Rp9.100.000.000,-, PNBPN PN sebesar Rp4.000.000,- dan PNBPN Lelang sebesar Rp1.600.000.000,-. Sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 153,39% sejumlah Rp 16.418.478.419,36, yang berasal dari:

- Realisasi PNBPN BMN : Rp14.072.690.259,- (154,64%)
- Realisasi PNBPN PN : Rp3.568.806,- (89,22%)
- Realisasi PNBPN Lelang : Rp2.342.219.354,36 (146,39%)

Rincian capaian persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2
Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TL K
Realisasi	40,33%	75,65%	75,65%	121,85%	121,85%	153,39%	153,39%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	108.65%	

TABEL 3.3
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2018-2022

IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang					
Tahun/ Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A			
PNBP Pengelolaan BMN	1.151.900.000		1.663.426.529	144,41%	
PNBP Piutang Negara	33.871.378		7.292.770	21,53%	
PNBP Lelang	1.197.000.000		1.210.659.549,27	101,14%	
2019	N/A	N/A			
PNBP Pengelolaan BMN	11.400.000.000		26.350.382.164	231,14%	
PNBP Piutang Negara	25.000.000		13.242.143	52,97%	

PNBP Lelang	2.036.800.000		1.221.952.579	59,99%	
2020	12.955.500.000	10.535.000.000	13.056.962.814	100,78%	123,94%
PNBP Pengelolaan BMN	11.000.000.000	8.580.000.000	11.487.498.317	104,43%	133,89%
PNBP Piutang Negara	4.500.000	4.000.000	12.818.077	284,85%	320,45%
PNBP Lelang	1.951.000.000	1.951.000.000	1.556.646.420	79,79%	79,79%
2021	10.986.000.000		14.396.284.752	131,04%	
PNBP Pengelolaan BMN	9.000.000.000		12.370.561.357	137,45%	
PNBP Piutang Negara	13.000.000		13.412.503	103,17%	
PNBP Lelang	1.973.000.000		2.012.310.892	101,99%	
2022	10.986.000.000		14.396.284.752	131,04%	
PNBP Pengelolaan BMN	9.100.000.000		14.072.690.259	154,64%	
PNBP Piutang Negara	4.000.000		3.568.806	89,22%	
PNBP Lelang	1.600.000.000		2.342.219.354,36	146,39%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemanfaatan BMN di lingkungan KPKNL Gorontalo;
2. Berkoordinasi dengan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN kondisi rusak berat;
3. Berkoordinasi dengan badan layanan umum terkait penerimaan Negara/PNBP dari pengelolaan asset;
4. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPB Gorontalo terkait realisasi PNBP BMN pada Aplikasi OM SPAN;
5. Berkoordinasi dengan Perbankan dan Pegadaian (penggalan potensi lelang);
6. Berkoordinasi dengan penyerah Piutang;

b. Persentase produktivitas lelang (1b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Rincian capaian IKU persentase produktivitas lelang dan perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.4
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Max/TLK
Realisasi	45,05%	49,67%	49,67%	54,22%	54,22%	55,23%	55,23%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.5
Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang tahun 2018-2022

Persentase produktivitas lelang					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A		N/A	N/A	-
2019	32%	-	40,72%	127,26%	-
2020	34%	-	38,46%	113,12%	-
2021	35%	-	36,51%	104,32%	-
2022	36%	-	55,23%	153,42%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online melalui media sosial;
2. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di wilayah kerja KPKNL Gorontalo.

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Rincian capaian persentase realisasi pokok lelang serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.6
Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	32,83%	75,92%	75,92%	108,76%	108,76%	167,84%	167,84%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.5
Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang tahun 2018-2022

Persentase Realisasi Pokok lelang					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	16.000.000.000	-	11.803.771.700	73,77%	-
2019	46.227.155.025	-	19.620.562.791	42,44%	-
2020	56.900.000.000	-	60.351.978.834	106,07%	-
2021	66.000.000.000	-	87.445.207.562	132,49%	-
2022	56.000.000.000	-	93.988.039.797	167,84%	-

Kendala yang dihadapi terhadap pencapaian target pokok lelang antara lain :

1. Kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat pandemi covid-19, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun;
2. Karakteristik fisik objek lelang di Gorontalo yang sulit laku (dalam tanah biasanya terdapat kuburan);
3. Pasar properti di Gorontalo cenderung tidak berkembang.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online melalui media sosial;
2. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di wilayah kerja KPKNL Gorontalo.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (2b-CP)

IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN dengan komponen:

1. PND/ Piutang Negara Dapat Disetor (angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, dan
6. Koreksi data (perbaikan/pencatatan nilai).

Rincian capaian persentase penurunan outstanding piutang negara serta perbandingan capaian kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.7
Capaian IKU Persentase Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP Persentase Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	5,06%	97,31%	97,31%	106,80%	106,80%	138,07%	138,07%	
Capaian	20,24%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.8
Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2018-2022

Persentase Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A		N/A	N/A	-
2019	N/A		N/A	N/A	-
2020	1.452.138.956	-	73.686.196	5,07%	-
2021	48.529.624	206.000.000	255.249.349	529,97%	123,91%
2022	52.000.000	57.000.000	78.698.442	151,34%	138,07%

Terdapat adendum target raw data IKU, yang semula dari Rp52.000.000 menjadi Rp57.000.000. Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang (perbankan dan BPJS);
- Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi;
- Melakukan penggalan potensi PSBDT;
- Mengingatkan kembali debitur terkait kewajiban penyelesaian hutang;
- Melakukan sosialisasi *door to door* terkait Crash Program Penyelesaian Piutang Negara kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal.

Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP)

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Pelayanan Penilaian, dan Pelayanan Lelang yang telah diberikan. Rincian capaian indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.9
Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi							
	3a-CP indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						4,70	4,70	Max/Ave
Realisasi						4,91	4,91	
Capaian						104,47%	104,47%	

TABEL 3.10
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL tahun 2018-2022

Persentase indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	4,60	-	4,63	100,65%	-
2019	4,60	-	4,67	101,52%	-
2020	4,67	-	4,70	100,64%	-
2021	4,68	-	4,86	103,85%	-
2022	4,70	-	4,91	104,47%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa untuk perbaikan berkelanjutan
- KPKNL Gorontalo membuat inovasi pelayanan yaitu dengan pemangkasan jangka waktu pelayanan/SOP sehingga pelayanan bisa selesai lebih cepat;

Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP)

Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK merupakan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN atas pengelolaan Aset Negara termasuk eksisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Objek dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Gorontalo.

Rincian capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.11
Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/TLK
Realisasi	-	93,29%	93,29%	93,76%	93,76%	93,76%	93,76%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.12
Perbandingan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2018-2022

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A		N/A	N/A	-
2019	N/A		N/A	N/A	-
2020	179	130	134	74,86%	103,08%
2021	133	-	133	100%	
2022	541	-	507	93,76%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan satker Kemenkeu di Lingkungan KPKNL Gorontalo;
 - b. Melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan.
- b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan (4b-CP)**

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Rincian capaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.13
Capaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	52,70%	101,90%	101,90%	101,90%	101,90%	101,90%	101,90%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	101,90%	101,90%	

TABEL 3.14
Perbandingan Realisasi Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan tahun 2018-2022

Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	62	-	100	161,29%	-
2019	150	-	178	118,67%	-
2020	300	-	304	101,33%	-
2021	300	-	300	100,00%	-
2022	315	-	321	101,90%	-

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Gorontalo, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Gorontalo dan kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Gorontalo;
2. Melakukan rapat koordinasi *triparted* antara BPK, Satker dan DJKN terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah;
3. Melakukan koordinasi secara formal dan informal kepada satker di wilayah kerja KPKNL Gorontalo yang menjadi target sertifikasi tanah.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (4c-CP)

Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Rincian capaian Persentase Penyelesaian BKPN serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.15
Capaian IKU Persentase Penyelesaian BKPN Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP Persentase Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	33,33%	66,67%	66,67%	83,33%	83,33%	100,00%	100,00%	
Capaian	120%	120%	120%	111,11%	111,11%	100,00%	100,00%	

TABEL 3.16
Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian BKPN tahun 2018-2022

Persentase Penyelesaian BKPN					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	30	-	30	100%	-
2019	23	-	27	117,39%	-
2020	20	10	23	115%	140%
2021	10	20	25	250%	125%
2022	6	-	6	100%	-

Isu Utama dari kegiatan ini adalah banyaknya Piutang Negara yang tidak memiliki Barang Jaminan sehingga dalam pelaksanaan penagihan tidak bisa dilakukan dengan metode eksekusi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Gorontalo, sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang;
- Melakukan kegiatan penyampaian surat paksa, penagihan langsung, dan penilaian barang jaminan;
- Melakukan sosialisasi *door to door* terkait Crash Program Penyelesaian Piutang Negara kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal;
- Melakukan penyampaian Surat Panggilan kepada Debitur.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4d-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Rincian capaian Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.17

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	30,08%	95,03%	95,03%	121,00%	121,00%	121,00%	121,00%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.18

Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2018-2022

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A	-	N/A	-
2019	N/A	N/A	-	N/A	-
2020	180	100	121	67,22%	121%
2021	70	-	85	121,43%	
2022	327	-	348	121%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;
- Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
- Melakukan survei lapangan evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama :

➤ Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (5a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Rincian capaian Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.19
Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min/Ave
Realisasi	0,32%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.20
Perbandingan Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tahun 2018-2022

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A	-	N/A	-
2019	N/A	N/A	-	N/A	-
2020	30%	-	1,49%	195,02%	-
2021	22%	-	1,58%	192,82%	-
2022	19%	-	0,03%	199,84%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Persetujuan pemanfaatan/pemindatanganan BMN yang membutuhkan penilaian BMN menggunakan nilai yang dihasilkan oleh JF Penilai;
- Konsisten untuk menggunakan metode penilaian;
- Melakukan mitigasi dari nilai usulan yang disampaikan pemohon, agar selalu didasarkan dengan nilai pasar wajar yang berlaku di pasaran, sehingga tidak terjadi selisih yang besar dengan hasil penilaian;
- Melakukan proses penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian yang berlaku;
- Memberikan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/penghapusan BMN;
- Membuat database hasil penilaian wajar BMN dan harga lelang BMN.

Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* (6a-CP)

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-Auction* meliputi pelaksanaan lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang dan *e-Conventional Auction* adalah lelang dengan

kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastuktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*). Target capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang.

Rincian capaian Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.21
Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan
E-Conventional Auction Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	108,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	118,15%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

TABEL 3.22
Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan
E-Conventional Auction tahun 2018-2022

Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A	-	N/A	-
2019	N/A	N/A	-	N/A	-
2020	90%	-	100%	111,11%	-
2021	92%	-	100%	108,70%	-
2022	92%	-	100%	108,70%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo selalu menyampaikan informasi kepada pemohon lelang agar permohonan dan pelaksanaan lelang dilakukan secara *e-auction* sebagaimana perkembangan teknologi dan informasi yang telah berkembang saat ini, sehingga semua pelaksanaan lelang pada KPKNL Gorontalo hingga saat ini tetap konsisten dilaksanakan dengan mekanisme *e-auction*.

b. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN (6b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;

2. Selisih antara pembukuan PNB MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain khusus lelang dengan PNB pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNB dari Biad PPN dan Bea Lelang adalah 10%.

Rincian capaian Deviasi data PNB Fungsional DJKN serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.23
Capaian IKU Deviasi data PNB Fungsional DJKN Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6b-CP Deviasi data PNB Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/Ave
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.24
Perbandingan Realisasi Deviasi data PNB Fungsional DJKN tahun 2018-2022

Deviasi data PNB Fungsional DJKN					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A	-	N/A	-
2019	N/A	N/A	-	N/A	-
2020	N/A	N/A	-	N/A	-
2021	12,5%	-	0%	200,00%	-
2022	10%	-	0%	200,00%	-

Pencapaian target kinerja ini dibutuhkan koordinasi antara Seksi Piutang Negara, Jafung Pelelang dengan Bendahara Penerimaan pada Seksi Hukum dan Informasi.

Sasaran Strategis 7 : Edukasi yang efektif

Indikator Kinerja Utama :

➤ Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (7a-N)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah satu tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4)

kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Rincian capaian tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.25
Capaian IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.7 Edukasi yang Efektif							
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	93	93	-	93	93	93	Max/Ave
Realisasi	-	97,80	97,80	-	97,80	97,80	96,18	
Capaian	-	105,16%	105,16%	-	105,16%	105,16%	103,42%	

TABEL 3.26
Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2018-2022

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	86	-	92,57	107,64%	-
2019	93	-	95,07	102,22%	-
2020	93	-	94,78	101,92%	-
2021	93	-	95,37	102,55%	-
2022	93	-	96,18	103,42%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN;
2. Selalu menjalin komunikasi yang baik dalam memberikan pemahaman kepada pengguna jasa, baik secara formal maupun informal.

Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indikator Kinerja Utama :

➤ Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (8a-CP)

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II tahun 2021 s.d.

semester I tahun 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II tahun 2021 s.d. semester I tahun 2022.

Rincian capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.27
Capaian IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.8 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	-	92,41%	92,41%	-	92,41%	98,73%	98,73%	
Capaian	-	120%	120%	-	120%	120%	120%	

TABEL 3.28
Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara
tahun 2018-2022

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	N/A	-	N/A	-
2019	70%	-	95%	135,71%	-
2020	80%	-	95,08%	118,85%	-
2021	80%	-	97,37%	120,00%	-
2022	85%	-	98,73%	116,16%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu.
2. Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNBPN sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Sasaran Strategis 9 : SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama :

➤ Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (9a-N)

Pengukuran Pengembangan kompetensi bagi pegawai dilakukan dengan pemenuhan standard kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi

pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2022.

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Rincian capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.29
Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.9 SDM yang kompeten							
	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	0%	30%	30%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	0%	75%	75%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.30
Perbandingan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2018-2022

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	90%	-	100%	111,11%	-
2019	87%	-	93%	106,73%	-
2020	100%	-	120%	120%	-
2021	100%	-	120%	120%	-
2022	100%	-	120%	120%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat database rekapitulasi data diklat/klc yang telah diikuti oleh para pegawai;
2. Melakukan koordinasi dan selalu mengingatkan para pegawai untuk dapat mengisi usulan diklat pada saat dilakukan DKI;
3. Mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengikuti diklat/klc dalam rangka pengembangan kompetensi masing-masing pegawai;
4. Pemetaan *hard competency* dan *soft competency* pegawai;
5. Mengingatkan pegawai yang belum memenuhi target jamlat agar dapat

- mengikuti pembelajaran *open access* pada *Kemenkeu Learning Center* (klc);
6. Mengusulkan pegawai tersebut untuk mengikuti pelatihan yang tersedia.

Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama :

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM (10a-N)

Tahun 2022, KPKNL Gorontalo berhasil mendapatkan predikat kantor ZI-WBBM dengan nilai indeks capaian sebesar 95,59 atau 112,46% dari target indeks sebesar 85. Adapun skor indeks minimal untuk mendapatkan predikat ZI-WBBM sebesar 84. Capaian Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM KPKNL Gorontalo Tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.31
Capaian IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.10 Organisasi yang fit for purpose							
	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,59	95,59	
Capaian	-	-	-	-	-	112,46%	112,46%	

b. Nilai Review Pengelolaan Kinerja (10b-N)

Hasil review pengelolaan kinerja digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketentuan terkait pengelolaan kinerja ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja yang meliputi empat aspek pengelolaan kinerja, yaitu perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Adapun untuk penilaian tingkat KPKNL dilakukan oleh Kantor Wilayah sebagai Submanajer Kinerja Organisasi (SMKO).

Rincian Nilai Review Pengelolaan Kinerja serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.32
Capaian IKU Nilai Review Pengelolaan Kinerja Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.10 Organisasi yang fit for purpose							
	10b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	93,05	93,05	
Capaian	-	-	-	-	-	116,31%	116,31%	

TABEL 3.33
Perbandingan Realisasi Nilai Review Pengelolaan Kinerja tahun 2018-2022

Nilai Review Pengelolaan Kinerja					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	70	-	91,82	131,17%	-
2019	92	-	94,43	102,64%	-
2020	70	-	88,67	126,67%	-
2021	75	-	89,53	119,37%	-
2022	80	-	93,05	116,31%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan internalisasi terkait pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai;
2. Menyusun dan melakukan penatausahaan dokumen kinerja dengan baik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara rutin;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi masing-masing unit dalam rangka pencapaian target kinerja.

c. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator (10c-N)

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui *Forum Group Discussion* kepada pegawai di lingkungannya dengan mengukur *feedback* peserta terhadap FGD yang dilaksanakan. Pengukuran efektivitas FGD dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO) berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), dan *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rincian Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.34
Capaian IKU Indeks Efektivitas FGD Pejabat Administrator Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.10 Organisasi yang fit for purpose							
	10c-N Indeks Efektivitas FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/TLK
Realisasi	99,05	99,48	99,48	99,62	99,62	99,69	99,69	
Capaian	110,06%	110,53%	110,53%	110,69%	110,69%	110,77%	110,77%	

TABEL 3.35
Perbandingan Realisasi Indeks Efektivitas FGD Pejabat Administrator tahun 2018-2022

Indeks Efektivitas FGD Pejabat Administrator					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	N/A	-	N/A	N/A	-
2019	N/A	-	N/A	N/A	-
2020	80	-	94,83	118,53%	-
2021	84	-	97,83	116,47%	-
2022	90	-	99,69	110,77%	-

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan segera penyampaian materi FGD kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD.
2. Mengimbau kepada peserta FGD untuk memberikan *feedback* tepat waktu.

Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal Indikator Kinerja Utama :

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (11a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian

keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Rincian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran serta perbandingan capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.36
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.11 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,02%	95,02%	
Capaian	104,71%	104,71%	104,71%	104,71%	104,71%	99,50%	99,50%	

TABEL 3.37
Perbandingan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2018-2022

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran					
Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Target Adendum
2018	95%	-	95%	100%	-
2019	95%	-	96,93%	102,03%	-
2020	95%	-	96,45%	101,53%	-
2021	95,50%	-	94,26%	98,70%	-
2022	95,50%	-	95,02%	99,50%	-

Pada tahun 2022, capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,02%, dan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 95,5%. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran Belanja Modal Konstruksi tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan I;
2. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana;
3. Adanya beberapa RO yang penyerapan anggarannya belum optimal disebabkan Pada Triwulan III pelaksanaan tugas dan fungsi sempat terhenti karena adanya penyebaran Covid-19;

KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan baik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin;

3. Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN;
4. Melakukan koordinasi dengan KPPN Gorontalo terkait progres capaian IKPA.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (11b-N)

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Capaian Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.38
Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022

KPKNL Gorontalo	SS.11 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-					170,5%	170,5%	
Capaian	-					120%	120%	

Berdasarkan 11 sasaran strategis tersebut di atas, terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja KPKNL Gorontalo pada Tahun 2022. Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan akhir Desember 2022 adalah sebesar 114,92% atau mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan NKO Tahun 2021 sebesar 113,38%.

Adapun NKO KPKNL Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.39
NKO KPKNL Gorontalo Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi	Keterangan
2018	111,80% (Hijau)	16 IKU Hijau, 1 IKU Merah
2019	112,14 % (Hijau)	17 IKU Hijau, 1 IKU Merah
2020	110,66 % (Hijau)	21 IKU, Semua capaian IKU Hijau
2021	113,38 % (Hijau)	19 IKU Hijau, 1 IKU Kuning
2022	114,92 % (Hijau)	19 IKU Hijau, 1 IKU Kuning

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Gorontalo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan.

KPKNL Gorontalo telah berusaha mengedukasi para satker, misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang *clean* dan *clear*, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Gorontalo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tusi. Hal tersebut telah dilakukan dengan memberikan contoh pemanfaatan langsung atas tanah di KPKNL Gorontalo yang disewakan untuk mendukung PEN dan UMKM. Terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Gorontalo mendorong satker untuk segera melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tusi satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.

KPKNL Gorontalo selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertifikat atas BMN.

4. Pemahaman peraturan yang tidak merata maupun tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.

KPKNL Gorontalo melakukan *sharing knowledge* baik secara internal, maupun kepada

eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, sehingga harapannya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat barang jaminan milik debitur tidak dapat dilakukan sita, serta terdapat beberapa debitur yang tidak kooperatif ketika ditagih.

KPKNL Gorontalo telah melakukan dan mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam rangka melakukan penagihan. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan. KPKNL juga secara massif dan persuasif mensosialisasikan adanya program keringanan hutang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, sehingga dampaknya banyak debitur yang mengikuti program keringanan hutang dan melunasi kewajiban-kewajibannya.

7. Terdapat objek lelang masih dikuasai oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga membuat masyarakat kurang berminat atas mengikuti lelang (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Gorontalo melakukan publikasi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk kondisi fisiknya adalah apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik apa adanya, tetapi secara dokumen formil, telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli dan dengan adanya *e-auction*, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih *fair* dan transparan.

8. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Gorontalo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para *stakeholder*, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui *e-auction*, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan DIPA tahun 2022 alokasi dana KPKNL Gorontalo sebesar Rp1.614.087.000 dengan realisasi penyerapan DIPA sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 3.39
PENYERAPAN ANGGARAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2022

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Realisasi s.d. Des 2022
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.598.319.000	1.614.087.000	1.506.671.400
Belanja Modal	0	0	0
Self blocking	-	-	-
Dana Khusus	-	-	-
Total	1.598.319.000	1.614.087.000	1.506.671.400

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. KPKNL Gorontalo berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan DJKN, Kantor Pusat DJKN telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2022. Di mana dalam keputusan ini, KPKNL Gorontalo telah ditunjuk untuk mengikuti Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2022. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2022, akhirnya KPKNL Gorontalo berhak mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM). Adapun pada tahun 2020, KPKNL Gorontalo telah berhasil meraih predikat ZI-WBK.

2. Inovasi KPKNL Gorontalo Tahun 2022

Pada tahun 2022 dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM, KPKNL Gorontalo membuat beberapa inovasi sebagai kegiatan pengembangan sistem aplikasi secara mandiri oleh KPKNL dalam rangka mendukung pelaksanaan dan monitoring tugas dan fungsi pada KPKNL Gorontalo, antara lain :

- Aplikasi SPEED, merupakan inovasi di bidang pelayanan penilaian. Aplikasi ini yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan penilaian KPKNL Gorontalo berbasis Teknologi Informasi, dirancang untuk meningkatkan transparansi penjadwalan dan mempermudah proses pengajuan permohonan serta

monitoring proses pelayanan penilaian oleh pengguna layanan secara *real-time*, pembuatan program kerja Penilai Pemerintah dan/atau Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dalam melaksanakan survei lapangan dan/atau analisis bidang penilaian yang terukur sesuai SOP dan norma waktu, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi oleh pemangku kepentingan dengan mengutilisasi database penilaian digital., supaya semua layanan penilaian dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, semua permohonan yang masuk dipastikan sudah free and clear dari sisi kewenangan dan kelengkapan, serta pola pengawasan yang lebih lebih baik.

- b. Aplikasi LEGO (Lelang Gorontalo), merupakan inovasi di bidang pelayanan lelang. Aplikasi ini diharapkan hadir sebagai solusi yang dapat menjembatani pemangku kepentingan (*shareholder*) dengan Pengguna Layanan (*stakeholder*) dengan mengembangkan serta meningkatkan pelayanan Lelang KPKNL Gorontalo berbasis platform layanan digital melalui *Google Playstore*. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan panduan pengajuan permohonan lelang secara daring dengan lebih nyata, panduan permohonan pelaksanaan dan layanan lelang berbasis tutorial video, pengisian survey kepuasan pelayanan lelang, transparansi akan kemudahan proses penyelesaian kutipan risalah lelang bagi pembeli, pengintegrasian permohonan online BPHTB bagi pembeli lelang Tanah/Bangunan, serta bantuan validasi KSWP.

3. Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA 2022

Anggaran merupakan salah satu sumber daya organisasi. Dalam mengelola anggaran yang tersedia, KPKNL Gorontalo senantiasa melaksanakannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo kembali meraih penghargaan pada acara *KPPN Gorontalo Awards Semester II Tahun 2022*. KPKNL Gorontalo berhasil meraih dua penghargaan, yaitu Peringkat Pertama atas Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Satker Pagu Sedang dan Satker dengan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ) Tercepat untuk Semester II Tahun Anggaran 2022.

4. Penghargaan Persentase PNPB dari Pengelolaan BMN Tertinggi Tahun 2022

KPKNL Gorontalo mendapatkan penghargaan atas prestasinya dengan Capaian Persentase PNPB dari Pengelolaan BMN Tertinggi di Lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalu Tahun 2022. Pemberian penghargaan disampaikan kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalu pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kanwil DJKN Suluttenggomalu Tahun 2023.

BAB IV | Penutup



Penutup

LAMPIRAN: Nilai Kinerja Organisasi 2022

Kontrak Kinerja Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo serta upaya peningkatan *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo pada tahun 2022 secara umum dapat dikatakan baik, dan dari 20 target IKU yang ditetapkan 19 IKU berada pada status hijau dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan masih terdapat 1 IKU yang berstatus kuning. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo Tahun 2022 adalah sebesar 114,92%, ini menunjukkan adanya peningkatan Nilai Kinerja Organisasi selama 5 tahun berturut-turut (2018-2022).

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Gorontalo untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Gorontalo dalam upaya menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan bidang tanah BMN yang akan disertipatkan sesuai dengan peraturan bersama antara BPN dengan Kemenkeu;
2. Melakukan koordinasi dengan BLU dan Kanwil DJPb terkait PNBp;
3. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melakukan penagihan dan penggalian potensi penyerahan piutang;
4. Mensosialisasikan lelang internet, sebagai sarana jual beli yang mudah dan aman;
5. Meningkatkan penggalian potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Gorontalo khususnya lelang BMD yang telah dihapusbukukan;
6. Meningkatkan pelayanan penilaian baik BMN maupun BMD;
7. Meningkatkan layanan guna memenuhi kepuasan pengguna layanan sesuai SOP.
8. Meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Gorontalo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. KPKNL Gorontalo berkomitmen melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan secara BERANI (Bersih Melayani) – “TimamangoMolango”. KPKNL Gorontalo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
PERIODE BULAN DESEMBER
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	153,39%	14%	50%	153,39%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	55,23%	14%	50%	153,43%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,84%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	167,84%	14%	50%	167,84%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	138,07%	14%	50%	138,07%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,47%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,70	4,91	21%	100%	104,47%	104,47%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,79%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							109,24%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	94%	14%	24%	144,24%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	101,90%	19%	33%	101,90%	101,90%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	100,00%	14%	24%	100,00%	100,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	121,00%	11%	19%	121,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,03%	14%	100%	199,84%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							103,42%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93,00	96,18	14%	100%	103,42%	103,42%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							116,16%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	98,73%	14%	100%	116,16%	116,16%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,29%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							113,18%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	95,59	14%	33%	112,46%	112,46%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	93,05	14%	33%	116,31%	116,31%	hijau
11b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90,00	99,69	14%	33%	110,76%	110,76%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							109,75%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,02%	14%	50%	99,50%	99,50%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,0%	171%	14%	50%	170,50%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,92%	hijau





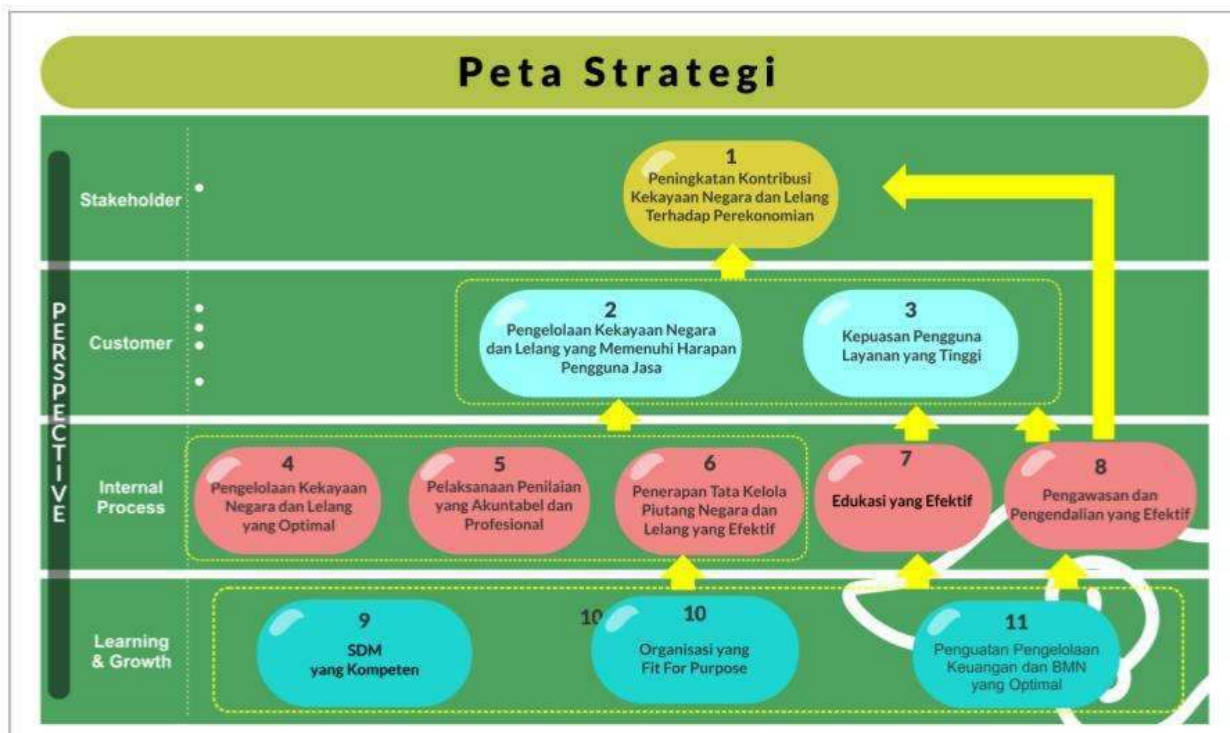
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 9/KN.28/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp188.508.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.437.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp184.071.000,00
Dukungan Manajemen	Rp1.409.811.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp4.880.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.388.251.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp10.856.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp5.824.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo
dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik
Diana Setiastanti



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,7	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif								
	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	93	-	93	93	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten								
	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>								
	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
	10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
	10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
	11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Diana Setiastanti



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Monitoring Kegiatan			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Monitoring Kegiatan			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Utandatangani Secara Elektronik
Diana Setiastanti



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Diana Setiastanti	NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	197512302002122001	NIP	197109121997031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1.1.... Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp....)
		1.2.... Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1.... Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp...)
		2.2.... Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp...)
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1.... Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.1.... Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4.2.... Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100% (305 bidang)
		4.3.... Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100% (3 BKPN)
		4.4.... Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% (50 NUP)
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1.... Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.1.... Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-conventional Auction</i>	92%
		6.2.... Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7.1.... Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8.1.... Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9.1.... Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10.1.... Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	85
		10.2.... Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10.3.... Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90



11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11.1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11.2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Diana Setiastanti
NIP. 197512302002122001

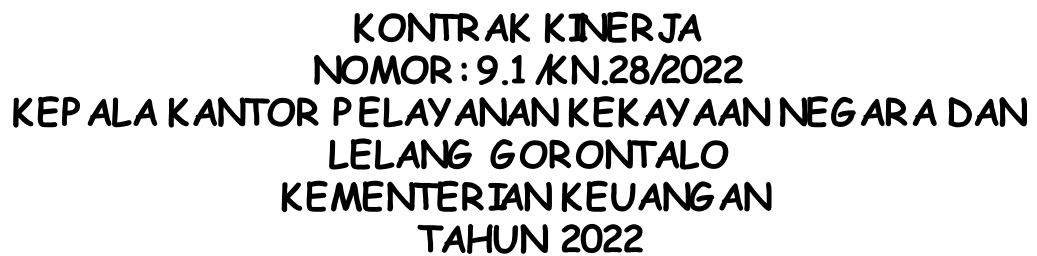
Manado, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP. 197109121997031001





1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	59,67%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	67,17%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	94,45%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	47,30%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	66,67%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	68,77%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	70%
10.	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp142.448.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.437.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp138.011.000,00
Dukungan Manajemen	Rp1.008.209.900,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp3.800.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp990.217.900,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp9.552.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp4.640.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo
dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	19,67%	19,67%	59,67%	59,67%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	7,17%	7,17%	37,17%	37,17%	67,17%	67,17%
	2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	44,45%	44,45%	64,45%	64,45%	94,55%	94,55%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,7	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
	4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	-	-	7,3%	7,3%	47,30%	47,30%
	4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	16,67%	16,67%	41,67%	41,67%	66,67%	66,67%
	4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	8,77%	8,77%	43,77%	43,77%	68,77%	68,77%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	6a-CP	Persentase	-	92%	92%	92%	92%	92%	92%



No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
		Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>							
	6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif								
	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	93	-	93	93	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten								
	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	10%	10%	35%	35%	70%	70%
10	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>								
	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
	10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
	10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	90	90	90	90	90	90
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
	11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



INSIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/KU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelblaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q2 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Monitoring Kegiatan			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Monitoring Kegiatan			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Utandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
13 April 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Iwan Darma Setiawan	NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	197104141993011001	NIP	197109121997031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1.1.... Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	59,67% (Rp.10.704.000.000)
		1.2.... Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1.... Persentase Realisasi Pokok Lelang	67,17% (Rp.56.000.000.000)
		2.2.... Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	94,5% (Rp.52.000.000)
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1.... Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.1.... Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4.2.... Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	47,31% (315 Bidang)
		4.3.... Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	66,67% (6 BKPN)
		4.4.... Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	68,77% (306 NUP)
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1.... Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.1.... Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-conventional Auction</i>	92%
		6.2.... Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7.1.... Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8.1.... Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9.1.... Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	70% (24 Pegawai)
10	Organisasi yang <i>FitFor Purpose</i>	10.1.... Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	85
		10.2.... Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10.3.... Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90



11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11.1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11.2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan
NIP. 197104141993011001

Manado, 13 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP. 197109121997031001

